

UNEMPLOYMENT, EDUCATION, HEALTH, AND POVERTY IN INDONESIA: ISLAMIC PERSPECTIVE

Yunita¹,

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Rosydalina Putri*²

*korespondensi

Email*: rosydalina.putri@radenintan.ac.id

² Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Zulaikah³

² Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

History of Article : received February 2026, accepted April 2026, published April 2026

Abstract - This study aims to analyze the influence of the open unemployment rate, educational attainment, and life expectancy on multidimensional poverty across 34 provinces in Indonesia from 2015 to 2024, through an Islamic economic perspective. The research employs a quantitative approach, utilizing numerical and statistical analysis to examine inter-variable relationships. Secondary data sourced from BPS-Statistics Indonesia is used, covering macro-level data for 34 provinces. The study utilizes panel data, combining time-series data from 2015 to 2024 with cross-sectional data from 34 provinces, resulting in a total of 340 observations. Partial results indicate that unemployment significantly increases poverty rates, while education plays a crucial role in reducing them. Conversely, life expectancy does not show a significant impact on economic productivity. These findings underscore the necessity of implementing the *Maqashid al-Sharia* concept to enhance welfare through educational advancement and job availability.

Keywords: Educational Attainment, Islamic Economy, Life Expectancy, Multidimensional Poverty, Open Unemployment Rate

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pencapaian pendidikan, dan harapan hidup terhadap kemiskinan multidimensional pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024 dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berarti analisis dilakukan berbasis angka dan statistik untuk menguji hubungan antar variabel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), mencakup data makro 34 provinsi di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data deret waktu dari tahun 2015 hingga 2024 dan data antar wilayah sebanyak 34 provinsi, sehingga menghasilkan total 340 observasi. Secara parsial, pengangguran terbukti meningkatkan angka kemiskinan, sementara pendidikan berperan krusial dalam menurunkannya. Di sisi lain, angka harapan hidup tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap produktivitas ekonomi. Hasil ini menggarisbawahi perlunya implementasi konsep *Maqashid al-Sharia* guna meningkatkan kesejahteraan melalui aspek pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Harapan Hidup, Kemiskinan Multidimensi, Pencapaian Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial ekonomi yang multifaset dan terus menjadi perhatian penting, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah multifaset yang mencakup beberapa dimensi kehidupan manusia yang saling terkait, meliputi faktor sosial, ekonomi, dan budaya (Hastin & Siswadi, 2021). Kemiskinan sebagian besar dinilai dengan metodologi berbasis moneter tunggal yang meneliti tingkat pendapatan (Clausen et al., 2025). Metode

ini gagal untuk secara komprehensif menggambarkan kemiskinan. Konsep kemiskinan multidimensi berfungsi sebagai kerangka kerja holistik, karena mencakup tidak hanya pendapatan tetapi juga aspek pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup.

Berbagai bentuk kekurangan yang dialami individu, termasuk kesehatan yang buruk, pencapaian pendidikan yang rendah, kondisi hidup yang tidak layak, akses terbatas terhadap layanan penting, kualitas pekerjaan yang tidak memadai, kerentanan terhadap kekerasan, dan lingkungan yang tidak layak huni (Balasubramanian et al., 2023, Fuady et al., 2021). Indikator-indikator ini berfungsi sebagai dasar untuk identifikasi kemiskinan yang lebih komprehensif. Menilai kemiskinan multidimensi menawarkan gambaran yang dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan dalam menangani dan mengurangi masalah yang terkait dengan kemiskinan multidimensi. Dedikasi negara terhadap kaum miskin sangat penting. Negara memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses ke layanan penting dan menumbuhkan suasana yang memungkinkan setiap individu untuk terlibat dalam pembangunan. Dengan menerapkan kebijakan yang sesuai, negara dapat memungkinkan kaum miskin untuk mengelola sumber daya secara efektif, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memutus siklus kemiskinan (Amadi et al., 2023).

Pada kemiskinan multidimensi metode pengukuran kemiskinan multidimensi yang paling banyak digunakan adalah *Metode Alkire-Foster (AF Method)*. Metode ini diperkenalkan oleh Alkire & Foster (2011) dengan berlandaskan *Capability Approach* Amartya Sen. Proses pengukuran kemiskinan multidimensi melalui metode *Alkire-Foster* dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu identifikasi dan agregasi. Tahap dari identifikasi bertujuan untuk mengidentifikasi rumah tangga yang termasuk kategori miskin. Miskin multidimensi berdasarkan ambang batas tertentu (*cutoff*). Umumnya, rumah tangga biasanya digolongkan sebagai miskin apabila mengalami kekurangan atau keterbatasan pada aspek-aspek tertentu pada lebih dari sepertiga total indikator yang digunakan. Selanjutnya, tahap agregasi menghitung ukuran kemiskinan secara keseluruhan melalui dua komponen, yaitu *headcount ratio* (H) yang mempresentasikan proporsi penduduk miskin multidimensi, dan *intensity* (A) yang menunjukkan rata-rata tingkat keterbatasan yang dialami oleh penduduk miskin. Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) diperoleh dari hasil perkalian antara H dan A (Damaiyanti et al., 2023)

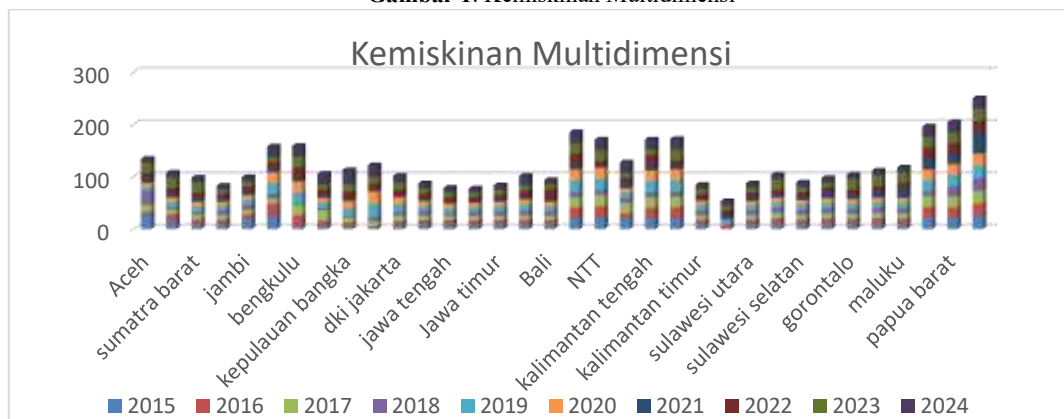
Secara teoretis, konsep kemiskinan multidimensi berkaitan erat dengan pemikiran Ragnar Nurkse pada tahun 1953 dalam karyanya, *The Vicious Circle of Poverty*. Nurkse mengemukakan hipotesis bahwa kemiskinan merupakan sebuah siklus yang saling mengunci, di mana keterbatasan modal, inefisiensi pasar, serta rendahnya kualitas modal manusia berujung pada produktivitas yang rendah. Lingkaran ini menciptakan kondisi di mana output ekonomi yang minim terus berulang, sehingga memerangkap suatu wilayah dalam kemiskinan yang berkelanjutan (EGBERT et al., 2025). Produktivitas rendah mengakibatkan pendapatan terbatas, yang kemudian menyebabkan pengurangan investasi dan tabungan. Kemiskinan merupakan fenomena di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami keterbatasan dalam mencapai standar hidup yang bermartabat di lingkungan mereka. Kondisi ini secara fundamental berakar pada rendahnya tingkat pendapatan, yang secara langsung menghambat akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar serta pencapaian kualitas hidup yang layak. Ada dua jenis kemiskinan: kemiskinan absolut, yang ditandai dengan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, dan kemiskinan relatif, yang ditentukan dengan membandingkan tingkat pendapatan di berbagai wilayah. Perbedaan regional dalam kondisi juga memengaruhi tingkat kemiskinan. M. L. Jhingan mengidentifikasi tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan di negara berkembang: sumber daya pendidikan yang tidak mencukupi, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan perilaku konsumsi yang suboptimal, di samping kecenderungan demografis terhadap pertanian dan ekstraksi sumber daya. Terdapat tiga pilar utama yang menyusun hipotesis *vicious circle of poverty* milik Ragnar Nurkse (Kuncoro, 2009). Perspektif ini memperluas cakupan kemiskinan melampaui indikator finansial, dengan menyoroti bahwa defisit kualitas sumber daya manusia dan marginalisasi akses terhadap fasilitas penting merupakan faktor sistemik yang memerangkap masyarakat dalam kemiskinan yang berkelanjutan.

Perspektif ini selaras dengan paradigma kesejahteraan Islam yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan esensial manusia melalui kerangka *Maqashid al-Syariah*. Sebagaimana pertama kali dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, tujuan fundamental syariah adalah mewujudkan kemaslahatan umat dengan memelihara lima elemen pokok (*al-daruriyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Al-Ghazali menegaskan bahwa kesejahteraan sejati melampaui aspek material semata; ia mencakup integrasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik. Kegagalan dalam menjamin salah satu dari kelima pilar ini dipandang sebagai bentuk ketimpangan sosial yang menjadi akar penyebab kemiskinan (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, kemiskinan perlu dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensional. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai studi telah dilakukan guna mengkaji kemiskinan multidimensi dan berbagai pendekatan. Meskipun studi mengenai kemiskinan multidimensi telah berkembang, kajian mengenai kemiskinan multidimensi di Indonesia masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan cakupan wilayah nasional dan periode waktu yang panjang. Di Indonesia, ketimpangan tingkat kemiskinan multidimensi antarprovinsi masih terlihat jelas. Beberapa provinsi menunjukkan tingkat deprivasi yang tinggi akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, sementara provinsi lain relatif lebih maju dengan tingkat kemiskinan multidimensi yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi tidak semata berkaitan dengan rendahnya pendapatan, melainkan juga mencerminkan ketimpangan pembangunan dan kualitas SDM antarwilayah. Berikut ini disajikan data kemiskinan multidimensi pada beberapa provinsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir (2015-2024).

Gambar 1. Kemiskinan Multidimensi



Sumber : BPS Indonesia, 2025

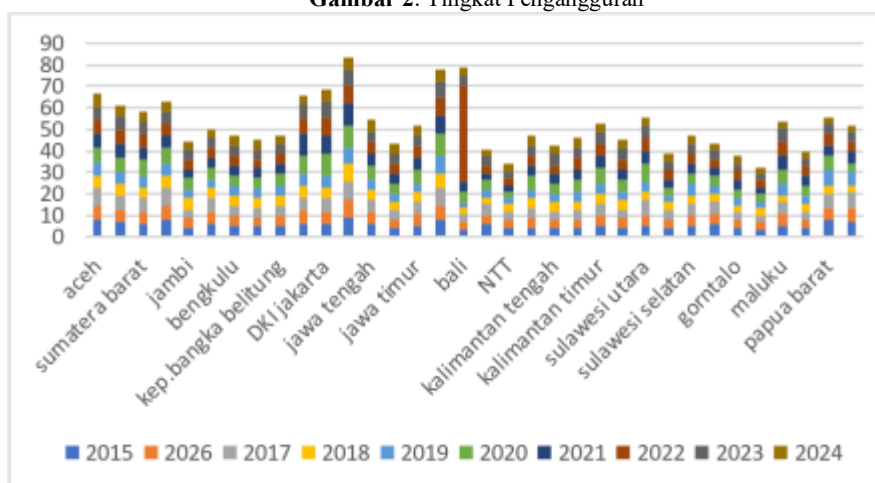
Grafik kemiskinan multidimensi di atas menunjukkan bahwa pola perubahannya tidak seragam antarprovinsi, tetapi ada kecenderungan umum yang bisa dibaca. Pada periode 2015–2019, sebagian besar provinsi mengalami penurunan atau relatif stabil, dengan penurunan rata-rata sekitar 5–15 persen, terutama di provinsi-provinsi Jawa dan sebagian Sumatra. Ini menandakan perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dasar pada periode tersebut. Memasuki 2020–2021, hampir seluruh provinsi mengalami lonjakan kemiskinan multidimensi. Kenaikannya cukup tajam, berkisar 15–30 persen, bahkan lebih tinggi di kawasan Indonesia timur seperti Papua Barat, Maluku, dan NTT. Peningkatan ini sejalan dengan dampak pandemi yang memperlemah akses layanan dasar dan pendapatan rumah tangga. Pada 2022–2024, terlihat adanya pemulihan, namun tidak sepenuhnya kembali ke kondisi pra-pandemi. Beberapa provinsi menunjukkan angka yang relatif besar. Papua Barat konsisten menjadi wilayah dengan kemiskinan multidimensi tertinggi yang masih meningkat hingga 2024. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa kemiskinan multidimensi sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, dan penurunannya cenderung berjalan lambat setelah terjadi krisis. Kemiskinan multidimensi tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan, melainkan mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan sosial dasar yang berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Provinsi yang memiliki nilai kemiskinan multidimensi rendah umumnya ditopang oleh infrastruktur yang lebih memadai, pemerataan pembangunan yang lebih baik, serta kemudahan akses pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, provinsi dengan tingkat deprivasi tinggi masih menghadapi kendala struktural yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif dan

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas modal manusia, meningkatkan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Secara struktural, pengangguran mencerminkan kegagalan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja produktif secara optimal (Grainca, 2022). Dampak langsung dari kondisi ini adalah ketergantungan pada sektor pekerjaan berkualitas rendah dengan upah yang tidak memadai, sehingga menciptakan hambatan signifikan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, tingginya angka pengangguran berfungsi sebagai indikator langsung dari rendahnya kesejahteraan ekonomi dan meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan multidimensi.

Ketidakstabilan status pekerjaan, seperti pekerja lepas atau kontrak, menjadi salah satu indikator utama masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan industri menjadi tolok ukur krusial bagi ketersediaan lapangan kerja. Rendahnya kapasitas penyerapan ini mengakibatkan kelompok masyarakat produktif kehilangan peluang untuk memperoleh penghasilan tetap, yang merupakan prasyarat dasar bagi kesejahteraan ekonomi. Jika jumlah lapangan pekerjaan seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, maka pengangguran dapat ditekan; sebaliknya, apabila lapangan kerja terbatas, maka jumlah pengangguran akan meningkat faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja meliputi pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dinamika perekonomian, serta kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan lapangan kerja (Sembiring et al., 2023). Berikut ini disajikan data tingkat pengangguran pada beberapa provinsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir (2015-2024):

Gambar 2. Tingkat Pengangguran



Sumber : BPS Indonesia, 2025

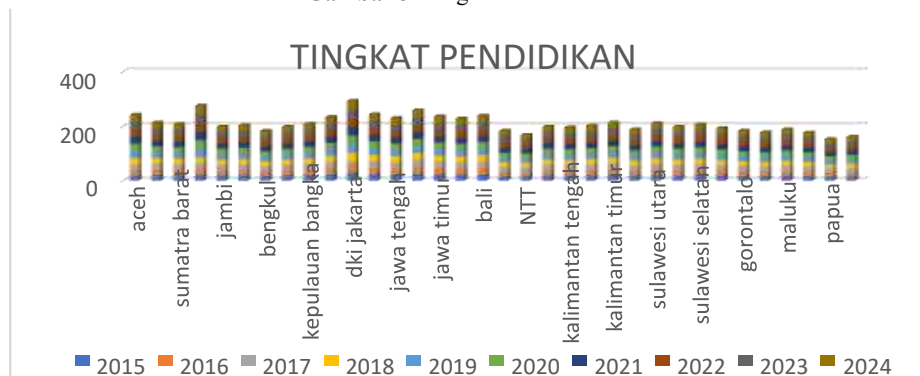
Distribusi tingkat pengangguran di 34 provinsi Indonesia periode 2015–2024 disajikan secara selektif dengan menonjolkan nilai ekstrem (tertinggi dan terendah) sebagai representasi variasi data. DKI Jakarta secara konsisten mencatatkan angka pengangguran tertinggi, dengan anomali signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 10,5%, melampaui rata-rata nasional sebesar 6,5%. Fenomena ini merupakan implikasi langsung dari pandemi COVID-19, di mana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melumpuhkan sektor jasa dan perdagangan. Akibatnya, terjadi disrupsi masif pada sektor formal yang memicu gelombang PHK dan menurunkan daya serap pasar tenaga kerja di ibu kota. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat pengangguran terendah secara konsisten adalah Sulawesi Barat dan Bali pada tahun-tahun sebelum pandemi, seperti periode 2018–2019, dengan angka rata-rata sekitar 2,3– 2,7%. Hal ini dapat dijelaskan oleh struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor primer dan pariwisata, yang pada masa itu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Namun, Bali mengalami peningkatan pengangguran yang cukup tajam pada periode 2020–2021, di

mana tingkat pengangguran sempat naik hingga sekitar 7,8%, karena pandemi menghentikan sebagian besar aktivitas pariwisata internasional, sehingga mengganggu rantai nilai ekonomi lokal dan menurunkan daya serap tenaga kerja secara drastis.

Tingkat pendidikan diakui secara luas sebagai variabel fundamental dalam memitigasi kemiskinan multidimensi di berbagai negara dalam kurun waktu yang signifikan. Secara teoretis, pendidikan berperan sebagai katalisator yang meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga mendorong produktivitas dan efisiensi kerja. Transformasi kapasitas ini pada akhirnya menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur peningkatan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, pengaruhnya juga dapat muncul secara langsung melalui pelaksanaan berbagai program peningkatan keterampilan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mereka memiliki kompetensi yang relevan untuk mendorong produktivitas individu yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan. Pendidikan menjadi sarana dalam meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk kemampuan memahami dan menguasai teori untuk menyelesaikan masalah- masalah yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan dan aktivitas produktif yang dilaksanakan oleh individu atau kolektif tertentu sehingga individu dapat berkembang menuju kedewasaan serta mencapai potensi optimal yang dimilikinya (Junita & Mukmin, 2022).

Pertumbuhan positif pada angka partisipasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas di seluruh wilayah. Ketimpangan akses antara pusat kota dan daerah pinggiran (wilayah 3T) menjadi hambatan besar dalam menciptakan modal manusia yang kompetitif. Defisit fasilitas fisik, seperti kerusakan bangunan sekolah dan keterbatasan sarana literasi serta praktik (perpustakaan dan laboratorium), memperparah kesenjangan kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat di daerah terpencil. Kurikulum sering kali belum sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, banyak lulusan yang belum siap kerja karena kurangnya keterampilan praktis. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan Pendidikan di Indonesia, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi tantangan ini salah satunya yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi peserta didik kurang mampu, bersama dengan beasiswa LPDP dan KIP Kuliah sebagai upaya peningkatan akses pendidikan tinggi. Pendidikan yang rendah membatasi kemampuan seseorang dalam mengakses pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai, sehingga meningkatkan risiko terjebak dalam kemiskinan secara berkelanjutan (Amadi et al., 2023; Hermawan & Bahjatulloh, 2022). Perbaikan Pendidikan yang berperan sebagai investasi pada modal manusia menjadi determinan utama dalam mewujudkan peningkatan kinerja perekonomian. Tingkat pendidikan individu diyakini mampu mengatasi kemiskinan. Berikut ini data tingkat pendidikan pada beberapa provinsi di Indonesia tahun 2015-2024:

Gambar 3. Tingkat Pendidikan

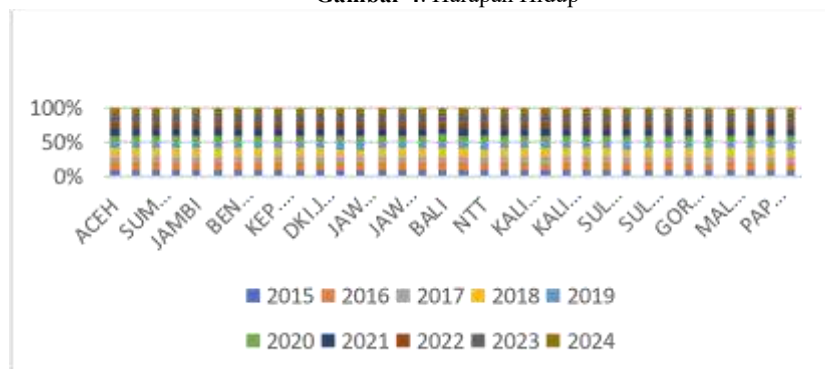


Sumber : BPS Indonesia, 2025

Penyajian grafik ini difokuskan pada persentase tertinggi dan terendah sebagai representasi

simbolis, sehingga tidak mencerminkan keseluruhan distribusi data secara rinci. Berdasarkan grafik tingkat pendidikan di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2024 yang diambil dari sejumlah provinsi, Provinsi dengan tingkat pendidikan tertinggi tercatat di DI Yogyakarta pada tahun 2017 dengan persentase sekitar 32%, sedangkan tingkat pendidikan terendah ditemukan di Papua pada tahun 2019 dengan persentase sekitar 14%. Perbedaan ini menunjukkan kesenjangan pendidikan yang cukup lebar antara wilayah barat dan timur Indonesia. Tingginya angka di DI Yogyakarta dapat dijelaskan oleh karakteristik daerah tersebut sebagai pusat pendidikan nasional, ditandai dengan konsentrasi lembaga pendidikan formal, ketersediaan tenaga pengajar yang memadai, serta budaya masyarakat yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebaliknya, rendahnya capaian di Papua disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan, sulitnya akses transportasi, serta masih rendahnya kualitas layanan pendidikan. Semakin baik tingkat pendidikan yang dicapai, semakin besar pula peluang individu untuk memperoleh pengetahuan dan akses yang memadai dalam menjaga kesehatan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Di sisi lain angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan mencerminkan kualitas hidup masyarakat, di mana rendahnya angka harapan hidup menunjukkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Berikut ini data angka harapan hidup pada beberapa provinsi di Indonesia tahun 2015-2024:

Gambar 4. Harapan Hidup



Sumber : BPS Indonesia, 2025

Berdasarkan observasi terhadap grafik distribusi harapan hidup, terdapat perbedaan nyata yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di berbagai provinsi. Sebagai representasi simbolis dari data keseluruhan, grafik menyoroti DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan capaian tertinggi, di mana penduduknya diproyeksikan memiliki usia harapan hidup hingga 78–79 tahun pada tahun 2024. Di sisi lain, Sumatera Barat menunjukkan angka yang relatif lebih rendah, yakni pada kisaran 70–71 tahun. Disparitas ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi pemerataan pembangunan manusia di tingkat regional. Tingginya angka harapan hidup di DI Yogyakarta dapat diuraikan melalui berbagai faktor, antara lain akses pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang memadai, serta budaya masyarakat yang menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran kesehatan, kemampuan ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sebaliknya, rendahnya angka harapan hidup di Sumatera Barat dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses kesehatan yang merata, disparitas pelayanan antarwilayah, serta faktor sosial-ekonomi yang membatasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup tidak semata ditentukan oleh faktor medis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan multidimensi yang saling berhubungan.

Perspektif ekonomi Islam mengonseptualisasikan kemiskinan sebagai kondisi defisit pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara fisik maupun non-fisik. Masalah ini dipandang bukan sekadar persoalan

ekonomi, melainkan disrupsi terhadap tatanan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Sharia*. Melalui kerangka ini, kemiskinan harus diintervensi karena dampaknya yang merusak pilar-pilar penting kehidupan manusia, yakni pemeliharaan keyakinan, keselamatan jiwa, kualitas akal, kelestarian keturunan, serta keamanan aset ekonomi (Maryatin et al., 2023; Pertiwi & Herianingrum, 2024). Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan belum terpenuhinya pemeliharaan harta, rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan lemahnya pemeliharaan akal, dan rendahnya angka harapan hidup mengindikasikan belum optimalnya pemeliharaan jiwa.

Dalam Perspektif Ekonomi Islam secara etimologis, kemiskinan bersumber dari bahasa Arab yang menggambarkan keadaan kefakiran ekstrem. Istilah fakir berakar dari kata *al-faqr* yang berarti kebutuhan atau kebergantungan (*al-ihtiyāj*). Dalam pandangan Islam, pengklasifikasian terhadap individu yang memiliki harta (uang) namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk ke dalam kelompok miskin. Sementara itu, masyarakat miskin secara umum dipahami sebagai kelompok yang tidak mempunyai harta serta penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup. Perbedaan antara kelompok fakir dan miskin merupakan aspek fundamental dalam hukum Islam untuk memastikan ketepatan penyaluran zakat sesuai amanat Surah At-Taubah ayat 60. Perspektif ini menegaskan bahwa kemiskinan memiliki dampak multidimensi; ia bukan sekadar kekurangan materi, melainkan ancaman nyata bagi kohesi sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Dengan mendudukan kedua golongan ini secara tepat, Islam berupaya memitigasi dampak buruk kemiskinan terhadap ketahanan nasional secara menyeluruh (Maryatin et al., 2023). Telah Berfirman Allah SWT dalam AlQur'an:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Setan memberikan ancaman kemiskinan dan mengajak manusia kepada sifat kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan serta limpahan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 268)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kriteria kefakiran pada dasarnya telah tercakup dalam konsep kemiskinan. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut kemudian disatukan dalam satu istilah, yaitu ‘miskin’, yang merujuk pada kondisi individu atau masyarakat yang tidak memiliki kecukupan sumber daya, terhadap makanan yang layak, tempat tinggal yang memadai, serta kebutuhan pokok lainnya guna menunjang kelangsungan hidup (Maryatin et al., 2023)

Penelaahan terhadap literatur terdahulu mengungkapkan adanya diskrepansi temuan mengenai pengaruh pengangguran, pendidikan, dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan. Sebagai contoh, studi oleh Hermawan & Bahjatulloh (2022) menemukan bahwa variabel pengangguran dan pendidikan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Sembiring et al. (2023) melaporkan bahwa pengangguran berkorelasi positif dan signifikan, sementara pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Inkonsistensi hasil ini mengindikasikan bahwa pola hubungan antarpelaku ekonomi tersebut sangat bergantung pada karakteristik wilayah serta rentang waktu penelitian yang digunakan.

Dari aspek kesehatan, terdapat kontradiksi temuan antara Niastuti & Setyowati (2024) yang menyatakan bahwa angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dengan Faturahman (2019) yang menemukan ketiadaan pengaruh akibat adanya faktor moderasi seperti alokasi anggaran kesehatan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa dampak kesehatan terhadap kemiskinan sangat kontingensial, bergantung pada dinamika sosial-ekonomi serta kualitas layanan medis setempat. Atas dasar tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pengaruh pengangguran, pendidikan, dan angka harapan hidup terhadap kemiskinan multidimensi di 34 provinsi

Indonesia (2015–2024) melalui kerangka ekonomi Islam. Dengan menyintesis landasan teoretis dan empiris, studi ini membangun model konseptual untuk menguji keterkaitan variabel-variabel tersebut dan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

Secara teoritis, pengangguran merupakan indikator utama ketiadaan pendapatan yang menyebabkan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar non-ekonomi seperti akses pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan, dan standar hunian yang sehat. Dalam kondisi tanpa pekerjaan, individu kehilangan daya beli untuk mengakses layanan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, semakin tinggi angka pengangguran di suatu provinsi, maka beban kemiskinan multidimensi di wilayah tersebut diprediksi akan semakin berat karena akumulasi deprivasi pada berbagai dimensi kesejahteraan. Relevansi teori *Vicious Circle of Poverty* dari Ragnar Nurkse dalam penelitian ini terletak pada peran sentral pengangguran sebagai katalisator rendahnya produktivitas dan pendapatan. Nurkse mengonseptualisasikan kemiskinan sebagai hasil dari interaksi kekuatan-kekuatan sirkular yang saling mengunci: pengangguran memicu defisit pendapatan, yang kemudian menghambat akumulasi tabungan serta investasi pada modal manusia. Dalam bingkai kemiskinan multidimensi, pengangguran menjadi hambatan struktural yang menghalangi akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Tanpa upah yang memadai, rantai kemiskinan sulit diputus karena ketiadaan modal untuk meningkatkan produktivitas di tingkat provinsi. Argumen ini diperkuat oleh temuan Sembiring et al. (2023) yang menegaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

H1 : Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi di 34 provinsi Indonesia.

Pendidikan merupakan instrumen modal manusia (*human capital*) yang krusial dalam mengeskalasi kapasitas, keahlian, dan produktivitas individu. Memiliki latar belakang pendidikan yang memadai memperbesar peluang seseorang untuk mengintegrasikan diri ke dalam pasar kerja formal atau menginisiasi kewirausahaan mandiri, yang secara linear meningkatkan pendapatan serta akses terhadap standar hidup layak, termasuk layanan kesehatan dan sanitasi. Dalam kerangka teori *Vicious Circle of Poverty* dari Ragnar Nurkse, pendidikan berfungsi sebagai intervensi strategis untuk memutus rantai kemiskinan dari sisi penawaran (*supply side*). Nurkse berargumen bahwa rendahnya produktivitas berakar pada keterbatasan modal; dalam hal ini, pendidikan rendah memicu stagnasi kualitas sumber daya manusia yang berujung pada pendapatan minim. Investasi pendidikan berperan sebagai *big push* (dorongan besar) untuk menghancurkan struktur lingkaran setan tersebut di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini selaras dengan temuan Hermawan & Bahjatulloh (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi.

H2: Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan multidimensi di 34 provinsi Indonesia

Secara teoritis, kesehatan yang baik merupakan aset utama bagi penduduk miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan, karena tubuh yang sehat memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pengobatan yang tak terduga. Dalam teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) dari Ragnar Nurkse, kesehatan yang rendah atau angka harapan hidup yang kecil merupakan salah satu mata rantai utama yang melanggengkan kemiskinan dari sisi penawaran. Masyarakat yang terjebak dalam lingkaran ini memiliki tingkat produktivitas yang rendah akibat kesehatan yang buruk, sehingga pendapatan yang dihasilkan pun rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi asupan gizi dan akses kesehatan yang layak yang

pada akhirnya kembali menurunkan angka harapan hidup. Melalui peningkatan Angka Harapan Hidup, diharapkan rantai kemiskinan tersebut dapat terputus; individu yang sehat akan menjadi modal manusia yang produktif, mampu menciptakan akumulasi modal dan pada akhirnya membawa masyarakat keluar dari jebakan kemiskinan sistemik yang dijelaskan oleh Nurkse. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kevin et al. (2022) yang mengatakan bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

H3: Angka harapan hidup diperkirakan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di 34 provinsi Indonesia

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) dari Ragnar Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan melingkar yang saling memengaruhi. Hipotesis pertama mengenai pengaruh positif tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan multidimensi didasarkan pada sisi penawaran dan permintaan dalam lingkaran tersebut. Pengangguran mencerminkan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kapasitas untuk menabung dan melakukan investasi fisik maupun modal manusia. Tanpa pendapatan dari pekerjaan, rumah tangga tidak mampu memenuhi dimensi dasar kesejahteraan seperti kesehatan dan sanitasi sehingga kemiskinan multidimensi akan semakin meningkat. Ketidakmampuan ekonomi akibat pengangguran ini menjadi hambatan utama yang menjaga individu tetap berada di dalam siklus kemiskinan yang berulang. Selanjutnya, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup dikaitkan dengan upaya memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas modal manusia. Hipotesis mengenai pengaruh negatif pendidikan terhadap kemiskinan didorong oleh pandangan bahwa pendidikan adalah eskalator yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga individu dapat keluar dari sisi rendahnya produktivitas dalam lingkaran Nurkse. Sejalan dengan itu, angka harapan hidup yang merepresentasikan kesehatan diposisikan sebagai variabel yang menunjang ketahanan fisik pekerja. Dalam teori ini, kesehatan dan pendidikan yang rendah akan menyebabkan rendahnya efisiensi kerja, yang kemudian melanggengkan pendapatan rendah. Oleh karena itu, peningkatan pada kedua variabel ini mampu memberikan dorongan kuat untuk mematahkan keterkaitan antar faktor-faktor kemiskinan, sehingga masyarakat di 34 provinsi Indonesia dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan yang inklusif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sipahelut et al. (2025) yang mengatakan bahwa Tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

H4: Tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan multidimensi pada 34 provinsi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang diperkaya dengan analisis deskriptif. Strategi kuantitatif dipilih untuk menguji hipotesis melalui pengukuran variabel secara numerik, yang selanjutnya diproses menggunakan teknik statistik sistematis (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 34 wilayah dengan rentang pengamatan sepuluh tahun (2015–2024). Karena seluruh anggota populasi dilibatkan dalam observasi selama periode tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *saturated sampling* atau sampel jenuh (Rifkhan, 2023). Dengan demikian, diperoleh total 340 observasi yang memberikan gambaran makro yang komprehensif mengenai pengaruh pengangguran, pendidikan, dan harapan hidup terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, mengingat

seluruh variabel menggunakan data sekunder. Analisis data diestimasi menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EVIEWS. Metode ini dipilih untuk mengevaluasi pengaruh pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan multidimensi melalui tiga pendekatan model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Guna menjamin objektivitas dan efisiensi parameter, dilakukan serangkaian uji spesifikasi model yang meliputi Uji Chow (CEM vs FEM), Uji Hausman (FEM vs REM), serta Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Tahapan seleksi model ini sangat krusial untuk memastikan hasil estimasi bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dalam merepresentasikan dinamika 34 provinsi di Indonesia.

Pasca penetapan model estimasi terbaik, penelitian dilanjutkan dengan serangkaian uji asumsi klasik guna menjamin validitas hasil regresi. Pengujian ini meliputi uji multikolinieritas untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linier yang kuat antarvariabel independen, serta uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varians galat bersifat konstan (*homoskedastisitas*). Analisis inferensial kemudian dilakukan melalui uji hipotesis, yang mencakup Uji t untuk mengevaluasi pengaruh variabel secara parsial dan Uji F untuk pengujian secara simultan. Terakhir, tingkat akurasi dan kemampuan model dalam menjelaskan variasi kemiskinan multidimensi diukur menggunakan Koefisien Determinasi.

Kemiskinan multidimensi merupakan paradigma komprehensif dalam pengukuran kemiskinan yang melampaui batasan aspek moneter atau pendapatan semata. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai dimensi esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, sebagai respons atas keterbatasan metode monodimensi yang hanya menitikberatkan pada kekurangan finansial (Kause & Fithriyah, 2024). Selaras dengan kerangka tersebut, penelitian ini mengadopsi indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup untuk memberikan gambaran kesejahteraan yang lebih holistik.

$$MPI = H \times A \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan; **MPI** = Indeks Kemiskinan Multidimensi, **H** (*Headcount Ratio*) = Proporsi penduduk miskin multidimensi, **A** (*Intensity of Poverty*) = Rata-rata intensitas deprivasi yang dialami penduduk miskin multidimensi.

Tingkat pengangguran dikonseptualisasikan sebagai fenomena di mana individu dalam rentang usia produktif yang memiliki kapasitas kerja serta sedang berupaya mencari lapangan kerja, belum berhasil memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu tertentu (Hastin & Siswadhi, 2021). Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai parameter utama untuk mengukur sejauh mana angkatan kerja tidak terserap oleh pasar tenaga kerja secara efektif.

$$TPT = (Jumlah\ Pengangguran / Jumlah\ Angkatan\ Kerja) \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan: **TPT**= Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pendidikan merujuk pada jenjang atau tahapan dalam sistem pendidikan formal yang mencerminkan pencapaian akademik seseorang. Konsep ini menggambarkan urutan hierarkis dalam proses pendidikan merentang dari tahap pendidikan dasar, berlanjut ke pendidikan menengah, hingga mencapai jenjang pendidikan tinggi (Sembiring et al., 2023). Penelitian ini menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan. Ukuran tersebut dipilih untuk menggambarkan tingkat pendidikan penduduk berdasarkan durasi pendidikan formal yang telah ditempuh.

$$RLS = \frac{\sum Li \times Pi}{\sum Pi} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan: **RLS**= Rata-rata lama sekolah, *Li* = Lama sekolah (tahun) pada jenjang pendidikan ke-I, *Pi*=Jumlah penduduk pada jenjang pendidikan ke-I, $\sum Pi$ = Total penduduk usia 15 tahun ke atas

Angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator fundamental dalam penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) yang merefleksikan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Sebagai parameter keberhasilan pembangunan kesehatan, peningkatan AHH berkorelasi linear dengan perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Standar kesehatan yang optimal dan AHH yang tinggi cenderung menjadi determinan dalam menekan angka kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh (Amalia & Mahmudah, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi AHH sebagai variabel representatif untuk mengevaluasi dampak kesehatan terhadap dinamika kemiskinan multidimensi di Indonesia.

$$AHH = \log(e_0) \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan: AHH= Angka Harapan Hidup, e_0 = Harapan hidup saat lahir (life expectancy at birth).”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Statistika Deskriptif

Variable	Sampel	Mean	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
KM	340	12.19	39.00	0.01	6.18
TPT	340	5.19	44.46	1.52	2.59
TP	340	20.81	32.20	10.70	3.62
AHH	340	4.26	8.83	4.15	0.25

Sumber: Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel statistik deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 340 observasi, variabel kemiskinan multidimensi (KM) memiliki nilai rata-rata sebesar 12,19 persen. Nilai maksimum KM mencapai 39 persen, sementara nilai terendah hanya 0,01 persen, mengindikasikan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat kemiskinan multidimensi antarprovinsi di Indonesia Standar deviasi sebesar 6,19 mengindikasikan bahwa variasi kemiskinan multidimensi antarwilayah relatif tinggi. Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki nilai rata-rata sebesar 5,19 persen, dengan nilai maksimum 44,46 persen dan minimum 1,52 persen. Rentang nilai yang cukup besar ini menunjukkan ketimpangan kondisi pasar tenaga kerja antarprovinsi. Nilai standar deviasi sebesar 2,59 menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka antarwilayah memiliki variasi yang cukup nyata selama periode penelitian. Selanjutnya, variabel tingkat pendidikan (TP) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,82, dengan nilai tertinggi 32,20 persen dan terendah 10,70%. Nilai standar deviasi sebesar 3,62 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan antarprovinsi relatif lebih homogen dibandingkan variabel kemiskinan dan pengangguran, meskipun perbedaan capaian pendidikan antarwilayah masih terlihat. Sementara itu, variabel angka harapan hidup (AHH) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,26, dengan nilai maksimum 8,84 dan minimum 4,16. Standar deviasi yang rendah sebesar 0,25 mengindikasikan bahwa variasi angka harapan hidup antarprovinsi relatif kecil, sehingga kondisi kesehatan masyarakat cenderung lebih merata dibandingkan variabel lainnya. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarprovinsi paling menonjol terjadi pada variabel kemiskinan multidimensi dan pengangguran, disaat yang sama pendidikan dan kesehatan relatif lebih stabil selama periode penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel terhadap 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2015–2024 untuk mengevaluasi pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, dan angka harapan hidup. Sebagai langkah awal dalam prosedur ekonometrika, dilakukan seleksi model estimasi guna menentukan pendekatan yang paling representatif di antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tahapan ini krusial untuk memastikan bahwa parameter yang dihasilkan bersifat efisien dan mampu menangkap dinamika antarwilayah serta runtun waktu secara akurat.

Pemilihan Model

Guna menentukan model estimasi yang paling representatif antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), penelitian ini melakukan Uji Chow (*Redundant Fixed Effects Test*). Pengujian ini krusial untuk mengevaluasi apakah penggunaan *intercept* yang bervariasi antarprovinsi dalam model *Fixed Effect* memberikan signifikansi statistik yang lebih baik dibandingkan model *Common Effect* yang mengasumsikan homogenitas data.

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	probabilitas
Crosssection F	60.292308	(33.303)	0.000

Sumber: Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 2, pengujian melalui Uji Chow (*Redundant Fixed Effects Test*) menghasilkan nilai *Cross-section F* sebesar 60,292308 dengan tingkat probabilitas 0,0000. Mengingat nilai signifikansi tersebut jauh di bawah ambang batas 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini mengindikasikan adanya heterogenitas yang signifikan antarwilayah di 34 provinsi Indonesia, sehingga penggunaan *Common Effect Model* (CEM) dinilai tidak memadai. Dengan demikian, *Fixed Effect Model* (FEM) ditetapkan sebagai model yang lebih tepat untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Dilanjutkan dengan Uji Hausman, dengan hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Stastic	Chi-Sq.d.f	probabilitas
Cross-section Random	13.968900	3	0.0029

Sumber: Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3, pengujian melalui Uji Hausman (*Correlated Random Effects*) menghasilkan nilai statistik *Chi-Square* sebesar 13,968900 dengan derajat kebebasan (*df*) 3. Nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0096, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara efek individual (*cross-section*) dengan variabel independen dalam model. Kondisi tersebut menyebabkan asumsi dasar *Random Effect Model* (REM) tidak terpenuhi, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) ditetapkan sebagai model yang paling tepat dan konsisten untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinieritas diterapkan untuk mengidentifikasi keberadaan korelasi linear yang tinggi atau hubungan yang sempurna antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian ini krusial untuk memastikan bahwa variabel tingkat pengangguran, pendidikan, dan angka harapan hidup bersifat independen satu sama lain, sehingga masing-masing variabel dapat menjelaskan variasi kemiskinan multidimensi secara akurat tanpa adanya tumpang tindih informasi statistik yang signifikan. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Uji Multikolenieritas

	TPT	TP	AHH
TPT	1.000000	0.249622	-0.009454
TP	0.249622	1.000000	0.040722
AHH	-0.009454	0.019717	1.000000

Sumber: Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas melalui matriks korelasi, ditemukan bahwa koefisien korelasi antarvariabel independen berada pada tingkat yang sangat rendah. Korelasi antara Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Pendidikan (TP) tercatat sebesar 0,249622; antara TPT dan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar -0,009454; serta antara TP dan AHH sebesar 0,040722. Seluruh nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas kritis sebesar 0,80. Temuan ini memberikan konfirmasi statistik bahwa model penelitian ini bebas dari gangguan multikolinearitas yang serius, sehingga pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan dapat diestimasi secara independen dan akurat.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Model yang ideal mensyaratkan adanya homoskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual bersifat konstan dan hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. error	t-stastic	Probabilitas
TPT	0.029602	0.034236	0.864656	0.3879
TP	0.033031	0.021985	1.502448	0.1340
AHH	-0.085772	0.620418	-0.138249	0.8901
Konstanta	2.491143	2.712930	0.918248	0.3592

Sumber: Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4, pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas yang berada di atas ambang batas signifikansi 0,05. Secara spesifik, nilai probabilitas tercatat sebesar 0,3879 untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 0,1340 untuk Tingkat Pendidikan (TP), dan 0,8901 untuk Angka Harapan Hidup (AHH). Temuan ini mengonfirmasi bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap residual absolut, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan.

Hasil uji Regresi data Panel *Fixed Effect Model*

Sesuai dengan prosedur seleksi model data panel, analisis regresi dalam studi ini diestimasi menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Pemilihan model ini didasarkan pada signifikansi statistik yang menunjukkan adanya perbedaan intersep antarwilayah yang tidak bersifat acak. Dengan menerapkan FEM, penelitian ini dapat mengontrol variabel-variabel yang tidak terobservasi namun bersifat konstan di tingkat provinsi, sehingga memitigasi risiko bias informasi dan memastikan hasil pengujian hipotesis bersifat lebih tangguh (*robust*). Hasil analisis menggunakan model ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Uji FEM

Variabel	Koefisien	Std.Error	t-Stastic	Probabilitas
TPT	0.193020	0.045497	4.242440	0.0000
TP	-0.084865	0.034785	-2.439665	0.0153
AHH	0.083114	0.783362	0.106099	0.9156
konstanta	12.59975	3.453871	3.648009	0.0003

Sumber: Peneliti, 2026

$$KM_{it} = 12,59 + 0,19 TPT_{it} - 0,08 TP_{it} + 0,08 AHH_{it} + \sum_{n=4}^{34} \beta_n D_{n-3} \dots \dots \dots (5)$$

Hasil estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) memberikan gambaran mengenai pengaruh dinamis variabel independen terhadap kemiskinan multidimensi di tingkat provinsi dalam kurun waktu 2015–2024. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan koefisien

positif sebesar 0,193020 dengan nilai probabilitas 0,0000, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan TPT secara signifikan akan memicu peningkatan kemiskinan multidimensi. Sebaliknya, Tingkat Pendidikan (TP) memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan koefisien -0,08486, menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan efektif dalam mereduksi tingkat kemiskinan. Sementara itu, Angka Harapan Hidup (AHH) dengan koefisien 0,083114 menunjukkan nilai probabilitas 0,9156, yang berarti variabel kesehatan dalam model ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap variasi kemiskinan multidimensi antarprovinsi di Indonesia.

Tabel 7. Uji t

Variabel	t-Statistic	Probabilitas
TPT	4.242440	0.0000
TP	-2.439665	0.0153
AHH	0.106099	0.9156
konstanta	3.648009	0.0003

Sumber: Peneliti, 2026

Analisis terhadap signifikansi parameter individu menunjukkan hasil yang bervariasi bagi ketiga hipotesis yang diajukan. Hipotesis 1 yang menyatakan pengaruh positif TPT terhadap kemiskinan multidimensi terverifikasi secara empiris. Demikian pula dengan Hipotesis 2, di mana tingkat pendidikan terbukti menjadi faktor pereduksi kemiskinan yang signifikan dengan arah koefisien negatif. Namun, pengujian terhadap Hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel kesehatan yang direpresentasikan oleh AHH tidak memiliki kekuatan statistik untuk menjelaskan variasi kemiskinan multidimensi dalam model ini, sehingga hipotesis tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Table 8 Uji F

F Statistic	107.9876
Prob(F-Statistic)	0.000000

Sumber: Peneliti, 2026

Hasil pengujian simultan menunjukkan nilai F-statistik dengan tingkat signifikansi 0,000000, yang memberikan legitimasi statistik untuk menerima Hipotesis Keempat (H4). Keberhasilan penolakan hipotesis nol ini mengindikasikan bahwa kombinasi variabel ekonomi (pengangguran), modal manusia (pendidikan), dan kesehatan secara bersama-sama merupakan determinan yang kuat bagi kemiskinan multidimensi. Signifikansi pada uji F ini juga menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* yang diestimasi bersifat konsisten dan layak digunakan untuk menarik kesimpulan kebijakan makro di Indonesia.

Table 9 Uji Koefisien Determinan

R-Square	Nilai
Adjusted R - squared	0.915654

Sumber: Peneliti, 2026

Nilai *R-squared* sebesar 0,927695 memberikan konfirmasi bahwa model *Fixed Effect* yang digunakan memiliki daya penjabar yang sangat tinggi. Sebesar 92,76 persen fluktuasi kemiskinan multidimensi dipengaruhi oleh dinamika pengangguran, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Rendahnya nilai residu atau faktor di luar model (sebesar 7,24 persen) menegaskan bahwa pemilihan variabel independen dalam studi ini sudah sangat representatif dalam memotret fenomena kemiskinan multidimensi di Indonesia selama periode 2015–2024.

Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan Multidimensi pada 34 Provinsi di Indonesia

Hasil analisis regresi data panel mengonfirmasi bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi di 34 provinsi di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap eskalasi angka pengangguran berkorelasi langsung dengan perluasan deprivasi masyarakat di berbagai dimensi. Secara teoretis, pengangguran memicu hilangnya arus kas masuk (*income inflow*) utama dalam rumah tangga, yang secara sistematis membatasi aksesibilitas terhadap kebutuhan fundamental seperti nutrisi, layanan kesehatan, dan hunian layak. Hubungan linear ini mempertegas bahwa keterbatasan partisipasi dalam pasar kerja menciptakan jebakan kemiskinan (*poverty trap*), di mana ketiadaan upah menjadi penghambat utama bagi individu untuk meningkatkan standar kualitas hidupnya.

Temuan mengenai pengaruh positif pengangguran terhadap kemiskinan multidimensi ini memberikan konfirmasi empiris terhadap teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Dalam kerangka pemikiran ini, pengangguran dipandang sebagai determinan hulu yang memicu rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan tersebut secara sistematis membatasi kapasitas rumah tangga untuk melakukan akumulasi modal, baik dalam bentuk tabungan fisik maupun investasi modal manusia (*human capital*) seperti pendidikan dan kesehatan. Fenomena ini menciptakan mekanisme hambatan melingkar di mana kemiskinan membatasi aksesibilitas terhadap pasar kerja, sementara ketiadaan pekerjaan tersebut melanggengkan status kemiskinan secara persisten.

Masyarakat yang menghadapi tingkat pengangguran terbuka tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja yang tersedia dan kapasitas ekonomi untuk menyerapnya. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja yang tidak proporsional dengan modal dan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi pekerjaan produktif (Kuncoro, 2009). Akibatnya, sebagian penduduk tetap menganggur atau hanya bekerja di sektor yang produktivitasnya rendah, sehingga pendapatan mereka terbatas. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan, karena rendahnya pendapatan menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan data BPS, persentase pengangguran terbuka menunjukkan pola fluktuatif, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar sekitar 10,5% dan titik terendah pada tahun 2018 sekitar 2,7%. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka cenderung diikuti oleh kenaikan kemiskinan multidimensi di 34 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan multidimensi pada 34 provinsi di Indonesia dapat diterima berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan.

Hasil dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring et al. (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran terbuka berkorelasi dengan bertambahnya tingkat kemiskinan secara signifikan. Kondisi pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga dapat memengaruhi kestabilan perekonomian suatu wilayah. Dampaknya paling nyata dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, meskipun secara tidak langsung kondisi tersebut turut memengaruhi lapisan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan multidimensi pada 34 Provinsi di Indonesia

Hasil estimasi regresi data panel mengonfirmasi bahwa Tingkat Pendidikan (TP) memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi di 34 provinsi di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa akselerasi kualitas dan aksesibilitas pendidikan merupakan instrumen krusial dalam mereduksi derajat kemiskinan. Secara teoretis, pendidikan berperan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan produktivitas serta kapabilitas individu, yang pada gilirannya memperluas

peluang untuk memperoleh pekerjaan layak dan penghasilan kompetitif. Melalui transmisi pengetahuan, masyarakat tidak hanya terlepas dari kerentanan finansial, tetapi juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap dimensi non-ekonomi seperti kesehatan, sanitasi, dan standar hunian, yang merupakan pilar utama dalam pengukuran kemiskinan multidimensi.

Temuan ini sejalan dengan teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Dalam konteks ini, pengangguran menjadi titik awal yang menyebabkan rendahnya pendapatan, yang kemudian memicu rendahnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, baik pada modal fisik maupun modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan pemikiran Nurkse, fenomena ini menciptakan hambatan melingkar di mana kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, dan ketiadaan pekerjaan tersebut pada akhirnya melanggengkan kondisi kemiskinan tersebut secara terus-menerus. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa tanpa adanya intervensi untuk memutus rantai pengangguran, provinsi-provinsi di Indonesia akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dipatahkan karena rendahnya produktivitas dan daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, yang menjelaskan bahwa keterbatasan pendidikan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang kemudian berimplikasi pada rendahnya produktivitas serta terbatasnya peluang memperoleh penghasilan yang memadai. Situasi ini memperparah berbagai bentuk ketertinggalan yang tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah dimensi pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup (Kuncoro, 2009).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermawan & Bahjatulloh (2022) Pendidikan memegang fungsi strategis dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi capaian pendidikan individu, semakin meningkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga kesempatan untuk lepas dari jerat kemiskinan menjadi lebih luas. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan jangka panjang, sebab mutu pendidikan sangat menentukan kualitas individu yang dihasilkan. Melalui proses pendidikan, akan lahir modal manusia yang unggul dan kompeten. Dengan demikian, setiap individu dituntut untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan agar mampu mendukung pembangunan yang lebih efektif.

Pengaruh harapan hidup terhadap kemiskinan multidimensi pada 34 Provinsi di Indonesia

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki koefisien positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan multidimensi di 34 provinsi di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan usia harapan hidup masyarakat tidak serta-merta bertransformasi menjadi instrumen reduksi kemiskinan secara langsung. Ketidaksignifikanan secara statistik ini diduga kuat karena adanya disparitas kualitas kesehatan; meskipun kuantitas umur masyarakat meningkat, namun jika tidak disertai dengan tingkat produktivitas ekonomi atau kualitas hidup yang prima (*healthy life expectancy*), maka perpanjangan usia tersebut tidak akan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan beban deprivasi dalam rumah tangga.

Temuan mengenai pengaruh tidak signifikan dari Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap kemiskinan multidimensi ini dapat dianalisis melalui sisi penawaran (*supply side*) dalam teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) dari Ragnar Nurkse. Nurkse berargumen bahwa kemiskinan merupakan hasil dari konstelasi kekuatan sirkular yang saling mengunci suatu wilayah dalam kondisi keterbelakangan. Dalam konteks ini, peningkatan kuantitas umur (AHH) tanpa disertai eskalasi kualitas modal manusia dan produktivitas tidak akan mampu memutus rantai kemiskinan tersebut. Fenomena penduduk yang hidup lebih lama namun terjebak dalam produktivitas rendah serta keterbatasan akses modal hanya akan memperpanjang fase pendapatan rendah dalam siklus Nurkse, sehingga akumulasi modal yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan kemiskinan

gagal terbentuk.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Faturahman (2019) yang menunjukkan bahwa aspek kesehatan tidak selalu berpengaruh terhadap kemiskinan, karena tingginya angka harapan hidup tidak menjamin kemampuan seseorang untuk bekerja secara optimal. Ketidaksignifikanan angka harapan hidup terhadap kemiskinan multidimensi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan usia harapan hidup masyarakat belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Angka harapan hidup lebih merepresentasikan peluang seseorang untuk hidup lebih lama, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesehatan yang bersifat produktif, kemampuan bekerja, maupun akses terhadap fasilitas dasar lainnya.

Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Harapan Hidup terhadap Kemiskinan Multidimensi pada 34 Provinsi di Indonesia

Hasil pengujian signifikansi melalui Uji F menunjukkan nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,000000, yang berada jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan, dan Angka Harapan Hidup secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Multidimensi di 34 Provinsi di Indonesia. Secara teoretis, hasil ini menegaskan bahwa kemiskinan multidimensi bukanlah fenomena yang dipicu oleh faktor tunggal, melainkan merupakan manifestasi dari akumulasi berbagai dimensi kesejahteraan yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan parsial, melainkan memerlukan kebijakan yang terintegrasi lintas sektor, khususnya pada aspek ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Penyebab kemiskinan dapat muncul dari kondisi alam yang kurang memberikan dukungan secara ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam konsep kemiskinan alamiah. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya alam, bencana alam, maupun tingkat kesuburan wilayah yang rendah dapat menjadi faktor penghambat aktivitas produksi dan distribusi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Di samping itu, kemiskinan juga dapat timbul akibat faktor manusia yang tercermin dalam bentuk kemiskinan struktural. Jenis kemiskinan ini berkaitan dengan sistem, kebijakan, struktur ekonomi, serta institusi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, terbatasnya kesempatan kerja, serta kebijakan yang kurang berpihak pada kelompok rentan dapat memperkuat kondisi kemiskinan.

Dalam pandangan Al-Ghazali, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan materi, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisik dan nonfisik. Ketidakterpenuhan salah satu unsur tersebut mencerminkan kondisi ketidaksejahteraan sosial yang berpotensi melahirkan kemiskinan. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Syātibī melalui konsep *maqashid al-sharia*, yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama hukum Islam. Perlindungan terhadap jiwa dan akal berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan, sedangkan perlindungan terhadap harta berkaitan dengan akses terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan yang layak (Pertwi & Herianingrum, 2024). Dalam pandangan ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor dari dalam diri individu, tetapi juga oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar.

Faktor internal berhubungan dengan usaha pribadi seseorang dalam bekerja, berikhtiar, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Adapun faktor eksternal meliputi terbatasnya kesempatan kerja serta tingginya standar kompetensi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja. Sebagai seorang pemikir sosial sekaligus sejarawan terkemuka, dalam karyanya *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menguraikan keterkaitan antara kemiskinan dan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Ia berpandangan bahwa kemiskinan tidak semata-mata bersumber dari keterbatasan individu dalam bekerja, melainkan

juga dipengaruhi oleh ketimpangan sosial, distribusi kekayaan yang tidak proporsional, serta lemahnya peran negara dalam mengelola perekonomian. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan disertai dengan kebijakan redistribusi kekayaan sebagai upaya untuk menekan tingkat kemiskinan (Agus, 2024).

Sementara itu, Fazlur Rahman sebagai seorang intelektual asal Pakistan, Dalam berbagai pemikirannya dijelaskan bahwa Islam menawarkan pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan bersifat inklusif, yang tidak semata-mata menitikberatkan pada distribusi kekayaan, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan sosial. Rahman menegaskan bahwa Islam menganjurkan sistem ekonomi yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan sosial sebagai prinsip utama. Ia juga menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat yang optimal serta penyediaan akses sumber daya yang lebih merata dan berkeadilan (Agus, 2024). Sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Menurut perspektifnya terhadap kehidupan, Islam menempatkan prinsip moderasi dan keseimbangan sebagai landasan utama (Qardhawi, 1997). Menurut Yusuf Qardhawi, kemiskinan dapat memunculkan berbagai dampak negatif yang membahayakan baik individu maupun tatanan sosial (Qardhawi, 1995).

Dampak tersebut berpotensi melemahkan akidah serta merusak kualitas akhlak dan moral seseorang. Kemiskinan merupakan keadaan kehidupan yang sangat membebani individu yang mengalaminya. emiskinan dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan dimensi kehidupan lainnya, sehingga dalam kondisi tertentu seseorang dapat mempengaruhi hal-hal mendasar, bahkan keyakinannya. Dengan demikian, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan kemiskinan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan dan keselamatan hidup manusia (Permata et al., 2023). AlQur'an memuat sejumlah ayat yang membahas persoalan kemiskinan dengan nuansa kritik sosial, salah satunya tercermin dalam QS. al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
إِحْسَانَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sampaikanlah (Nabi Muhammad) Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”, (Al-An'am/6:151)

Ayat tersebut menegaskan larangan menghilangkan nyawa anak akibat kondisi kemiskinan, yang sering kali memunculkan anggapan bahwa kehadiran anak hanya akan menambah beban ekonomi keluarga. Selain itu, Al-Qur'an menekankan agar manusia tidak merasa khawatir terhadap urusan rezeki, karena sumber penghidupan bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah sebagai pemberi rezeki. Allah menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut, yang penting adalah kamu berusaha untuk mendapatkannya (Permata et al., 2023). oleh karena itu, kemiskinan multidimensi dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap tujuan-tujuan dasar syariat (maqasid al-sharia)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan naskah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan yang memperparah kemiskinan multidimensi di 34 provinsi Indonesia, sementara peningkatan capaian pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, angka harapan hidup ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, yang mengindikasikan bahwa perbaikan sektor kesehatan belum berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian pengangguran dan perluasan akses pendidikan merupakan langkah krusial yang sejalan dengan tujuan *Maqasid al-Sharia* dalam ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasi penelitian ini menekankan bahwa pengentasan kemiskinan multidimensi di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya melalui bantuan tunai, melainkan harus menasar akar masalah dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas modal manusia melalui pendidikan yang inklusif. Secara praktis, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar agar tingkat pengangguran dapat ditekan secara struktural. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti dapat memperluas ruang lingkup variabel dengan memasukkan faktor-faktor spesifik ekonomi Islam lainnya, seperti efektivitas pendayagunaan zakat dan wakaf produktif di setiap provinsi, serta menggunakan indikator kemiskinan yang lebih dinamis untuk menangkap fenomena kemiskinan pasca-pandemi secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2024). Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 7(2), 45–67. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v7i2.276>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Understandings and misunderstandings of multidimensional poverty measurement. *The Journal of Economic Inequality*, 9(2), 289–314.
- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya pemerintah dalam menjamin hak pendidikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia: Sebuah fakta yang signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>
- Amalia, N., & Mahmudah, M. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Dengan Melihat Nilai Statistik Cp Mallows. *Jurnal Wiyata: Penelitian Sains Dan Kesehatan*, 7(1), 13–19. <https://doi.org/10.56710/wiyata.v7i1.157>
- Clausen, J., Barrantes, N., Trivelli, C., & Salas, F. (2025). Evaluating Poverty in all its Forms and Dimensions: Monetary, Multidimensional, and Subjective Poverty in Peru. *Social Indicators Research*, 179(2), 861–893. <https://doi.org/10.1007/s11205-025-03641-7>
- Damaiyanti, D., Harlen, H., & Widayatsari, A. (2023). Analisis Determinan Rumah Tangga Miskin di Riau: Pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 208–225. <https://doi.org/10.14710/jdep.6.3.208-225>
- EGBERT, H., HOFFSTADT, M., SEDLARSKI, T., & TODOROV, A. B. (2025). Pioneers of Development Economics in the 1940s and 1950s: Foundations of Contemporary Economics. *Journal of Economic and Social Thought*, 12(4), 171–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.65810/jest.2653>
- Faturahman, F. (2019). Angka Harapan Hidup sebagai Intervening Anggaran Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 3(1), 24–40. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.269>
- Fuady, M. R. F., Fuady, M., & Aulia, F. (2021). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *TATALOKA*, 23(4), 575–582. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330->

- Grainca, B. (2022). Methodological basis of unemployment. *International Journal of Social, Political and Economic Research*, 9(1), 163–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol9iss1pp163-183>
- Hastin, M., & Siswadhi, F. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 10(1), 1–22.
- Hermawan, A. A., & Bahjatulloh, Q. M. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Indonesia Tahun 2016-2020. *El-Amwal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i1.6183>
- Junita, D., & Mukmin, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dp3ap2kb Kabupaten Bima. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 96–108. <https://doi.org/10.30738/jm.v12i1.3074>
- Kause, J., & Fithriyah, F. (2024). Analisis Determinan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(2), 115–127. <https://doi.org/10.23969/jrie.v4i2.98>
- Kevin, A. V., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh Pdrb, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Kuncoro, M. (2009). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Maryatin, M., Puspaningrum, N., & Prihantono, J. (2023). PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 4(2), 80–90.
- Niastuti, R., & Setyowati, E. (2024). Human development index, unemployment, and poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(2), 134–149.
- Permata, S., Abubakar, A., Sabry, M. S., Boni, S. Y., & Arifai, S. (2023). Strategi penanganan kemiskinan dalam perspektif al-quran. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 164–177. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2066>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Priyatno, D. (2016). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS Dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews*. Andi Offset.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Rezzy Eko Caraka, H. Y. (2017). *Spatial Data Panel*. Wade Group.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner*. CV. Adanu Abimata.
- Sembiring, C., Masinambow, V. A. ., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2).
- Sipahelut, M. G., Masinambow, V. A. J., & Tolosang, K. D. (2025). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(2), 156–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i2.139>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*.
- Syahroni, M. I. (2023). Analisis data kuantitatif. *EJurnal Al Musthafa*, 3(3), 1–13.